

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisasmita Raharjo, (2006). Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan,  
Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ali Chomzah, (2002). Hukum Pertanahan Seri I dan Seri II, Jakarta: Prestasi  
Pustaka
- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Aminuddin Salle, (2010). Bahan Ajar Hukum Agraria, Makassar: AS  
Publishing
- Arba, (2006). Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jawa Timur
- Boedi Harsono, (2003). Menuju Ksesmpurnaan Hukum Nasional,  
Universitas Trisakti, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, (1989). Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah  
Berlakunya U.U.P.A., Armico, Bandung
- Effendi Perangin. (1991). Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari  
Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Gunawan Wiradi, 2009. Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum  
Berakhir edisi revisi, INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar,  
Yogyakarta.
- H.M, Arba, (2016). Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Nurlinda, 2009. Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma.

- Kartasapoetro, G. (1998) Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendapatan Tanah, Bina Aksara, Jakarta.
- Kurnia Warman (2), 2009. Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera barat, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Maria S.W., (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2010). Reforma Agraria di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukhtosar, (2007). Perencanaan Pesisir Dan Laut, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Mochtar Kusumaatmadja. (2013). Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. P.T Alumni.
- Moh. Mahfud MD, 2011 Politik Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Shohibuddin, (2018). Prespektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian, STPN Press, Yogyakarta.
- Rachman, NF (2017), Land Reform Dan Gerakan Agraria Nasional, Insistpress, Yogyakarta
- Saleh Adiwinata, (1984). Hukum Perdata dan Tanah 1, Remaja Karya CV. Bandung

- \_\_\_\_\_, (1997). Hukum Agraria, Pasundan Law Faculty Press.
- Saim Aksinudin. (2022). Hukum Pertanahan Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia. Inteligencia Media, Malang.
- Satjipto Rahardjo, (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2010) Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suhanan Yosua, (2010). Hak Atas Tanah Timbul (aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan, Restu Agung, Jakarta.
- Supriyadi. (2018). Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2010). Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Suripin, (2002). Pelestarian Sumberdaya Tanah Dan Air, Andi, Yogyakarta
- Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Soemitro, R. H. (1994). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Ter Haar, (2001). Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Dikutip dari Spebakti Poeponoto, Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita
- Urip Santoso, 2005, hukum Agraria dan hak atas tanah, Jjakarta: preda media

Urip Santoso, (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta:  
Kencana

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang  
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-  
Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-  
undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir  
dan pulau-pulau kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah  
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan, Hak  
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan  
Lindung

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan  
Reforma Agraria

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Nomor :  
410- 1293 tahun 1996

Surat Edaran Menteri Agraria/BPN nomor 410-1293 tanggal 9 Mei 1996  
tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9  
tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas  
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah  
Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak  
atas tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 17 tahun 2016 tentang  
Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
Burgerlijk Wetboek

### **C. Sumber Hukum Lainnya**

Alfurqon, A 2009, 'Reforma Agraria dan Peningkatan Kesejahteraan  
Petani', Skripsi, pada Fakultas Ekologi Manusi, Institut Pertanian  
Bogor

Julius Sembiring, "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria",  
Jurnal Bhumi, Edisi No. 2 Vol 2, (2016), hlm. 121.

Nurhasan Ismail, dkk., “Penjabaran Asas-asas Pembaharuan Agraria berdasarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 dalam Perundang-undangan di bidang Pertanahan”, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum, Universit

Neilson, Jeff, Agrarian Transformations and Landreform in Indonesia, in John F. Mc. Carthy and Kathryn Robinson (editors), Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty, ISEAS Publishing, Singapore, 2016, hlm. 246. as Gajah Mada, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, Yogyakarta.

Siti maesaroh, Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Timbul, Universitas Airlangga, Skripsi, 2007

Surat Edaran Nomor HT.03/757/VI/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan

Wahanisa, Arif Hidayat, “Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh ak Milik Atas Tanah”, Jurnal Pandecta, Edisi No. 1 Vol 3, (2009)

Waryanta 2016, ‘Reforma Agraria : Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil Dalam Mendukung Ketahanan Pangan’, Jurnal Bhumi Volume 2 No. 2, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.